

PERAN SERTA PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PEMERINTAH UNTUK PERBAIKAN EKONOMI DI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

Aji Dwi Utomo¹, Dr. Tri Yuliyanti, M.Si², Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si³

Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ajiutomo697@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada perekonomian masyarakat dan pemerintah mengumumkan resesi kuartal pertama. Data pekerja terdampak imbas Covid-19 yang dihimpun Kemenaker, dengan penggabungan data Disnaker Pemda di seluruh Indonesia, hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Untuk data dari data yang sudah di cleansing dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencapai 2,1 juta orang yang terdata by name by address. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat Covid lebih daripada krisis ekonomi di tahun 1998.

.Kata Kunci: covid-19, usaha, bantuan

Abstract

In Indonesia, the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy had an impact on the people's economy and the government announced a first quarter recession. Data on workers affected by the impact of Covid-19 compiled by the Ministry of Manpower, with the merging of data from the Local Government Manpower Office throughout Indonesia, until July 31, 2020, shows that in total both formal and informal workers affected by Covid-19 reached more than 3.5 million people. For data from data that has been cleansed with the Social Security Administering Body (BPJS), it reaches 2.1 million people who are registered by name by address. This situation is due to the large number of companies or medium-sized businesses being forced to terminate their employment. Daily workers lose their livelihoods. The seller lost his customer. Many small and medium SME sectors are losing consumers. The Minister of Finance, Sri Mulyani, stated that the economic crisis caused by Covid was more than the economic crisis in 1998.

Keywords: covid-19, effort, assistance

Aji Dwi Utomo¹, Dr. Tri Yuliyanti, M.Si², Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si³
Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Telp. (031) 5931800, Faks. (031) 5927817
Ajiutomo697@gmail.com

PENDAHULUAN

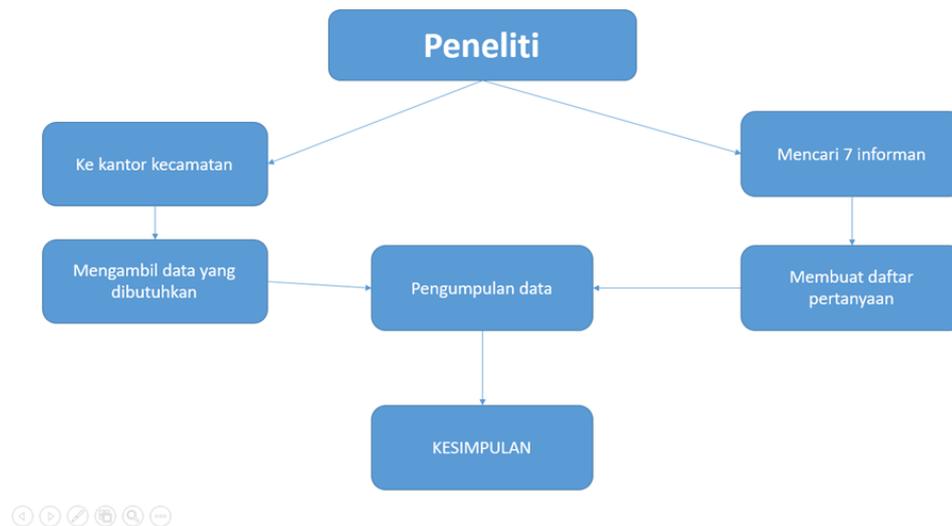
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada perekonomian masyarakat dan pemerintah mengumumkan resesi kuartal pertama. Data pekerja terdampak imbas Covid-19 yang dihimpun Kemenaker, dengan penggabungan data Disnaker Pemda di seluruh Indonesia, hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Untuk data dari data yang sudah di cleansing dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencapai 2,1 juta orang yang terdata by name by address. Situasi ini akibat banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya. Penjual kehilangan pelanggannya. Banyak sektor-sektor usaha kecil menengah UKM kehilangan konsumen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat Covid lebih daripada krisis ekonomi di tahun 1998.. Ekonomi Indonesia tidak stabil bahkan ekonomi dunia. Indonesia membuat kebijakan bantuan sosial tunai, yang diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi. Serta daya beli masyarakat bisa meningkat. Pemerintah mengkolontorkan dana 500.000 per-kepala keluarga untuk bantuan keluarga kurang mampu atau kesulitan dikala pandemi.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan, tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada implementability dari program itu, yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, (2) tipe atau jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program?, dan (6) sumber daya yang dilibatkan. Demikian dengan konteks kebijakan juga mempengaruhi proses implementasi. Yang dimaksud oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah: (1) kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Inten-sitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi efektivitas implementasi. Hal ini searah dengan variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, dimana juga berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994: 22-25).

Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. “penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian (McMillan & Schumacher,2003). Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan guna memperoleh data yang mendalam mengenai Peran Serta Program Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Untuk Perbaikan Ekonomi Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kantor Kecamatan Sumobito mengecek data penerima bantuan sosial dan ke beberapa lokasi untuk mendapatkan informasi dari informan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian mengenai “Peran Serta Program Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Untuk Perbaikan Ekonomi Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”, maka peneliti disini berperan langsung dalam proses penelitian, sehingga kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan sebagaimana peranan peneliti sebagai instrument

utama dalam mengamati gejala-gejala yang terjadi di lapangan. Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Peran peneliti yaitu sebagai pengamat partisipan atau pengamat penuh. Kehadiran peneliti juga diketahui oleh informan atau lembaga yang diteliti (Ahmad Tanzeh:167).

Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:207) batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu mengajukan fokus penelitian. Fokus penelitian yang ditentukan peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, fokus penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Perbaikan Ekonomi Di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Teknik Pengumpulan Data

Bungin (ed) (2003:42) menjelaskan teknik pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang di perlukan dapat di kumpulkan sehingga hasil akhsir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid, (Bungin, 2003:42)

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara
2. Obeservasi
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap:

1. Menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau informan.
2. Melakukan wawancara dengan masyarakat setempat yang menerima Bantuan sosial.
3. Melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.
4. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.
5. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam upaya perbaikan ekonomi di kecamatan Sumobito jombang

Pemerintah mengadakan bantuan untuk masyarakat, baik bantuan sembako, bantuan sosial tunai. Bantuan ditargetkan bagi keluarga yang tergolong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Rp 500.000 tersebut merupakan tambahan satu kali transfer untuk keluarga penerima kartu BNPT. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat. Jika Anda termasuk dari warga terdampak covid-19 dan

sudah memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial tunai, berikut cara klaimnya:

1. Pastikan tidak terdaftar di program bantuan sosial pemerintah yang lain
2. Cek apakah nama Anda sudah terdaftar ke penerima bantuan sosial tunai ke RT/RW setempat Jika belum, daftarkan diri dengan melampirkan fotokopi KTP untuk diberikan ke kepala desa untuk data Anda diserahkan kepada bank-bank milik negara yang dilibatkan pada program.
3. Tunggu informasi selanjutnya mengenai pencairan dana ke rekening Anda (jika memilih sistem transfer)

BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang sudah atau terdaftar atau

belum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Rinciannya, BST akan di transfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos Indonesia.

Bagi yang memilih sistem transfer rekening, berikut daftar rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri dan BTN. Bagi yang tak punya rekening bank, ambil uang BLT melalui Kantor Pos. Proses pencairan langsung penerima BLT secara nontunai (transfer) tidak dikenai biaya dan bunga. Penerima BST adalah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi covid-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (by name by address), NIK dan nomor handphone.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelayanan, maka perlu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan itu sendiri. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan.

Dampak Bantuan sosial Tunai Terhadap Kegiatan Perekonomian penduduk kecamatan Sumobito

Peran bantuan sosial tunai pemerintah dalam perbaikan ekonomi di kecamatan sumobito berperan besar. Para staff kecamatan juga mendata penerima bantuan sosial secara menyeluruh.

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan. Data pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi, sehingga tidak terjadi data ganda. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia

Adapun dampak dari masyarakat adalah :

1. usaha kecil bisa mendapatkan pelanggan kembali karna daya beli masyarakat mulai normal.
2. masyarakat yang tidak mampu tidak khawatir lagi jika tidak makan.
3. masyarakat miskin terbantu untuk membeli kebutuhan pokok sehari hari

PERAN SERTA PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI
PEMERINTAH UNTUK PERBAIKAN EKONOMI
DI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

Aji Dwi Utomo

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Peran Serta Program Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Untuk Perbaikan Ekonomi di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa :

Pandangan masyarakat tentang program Bantuan Sosial Tunai dalam Ekonomi di kecamatan Sumobito - Jombang sangat baik karena di dukung oleh pelayanan yang maksimal dari pihak kecamatan dengan mendata secara menyeluruh, meskipun ada yang belum di data namun setelah mengajukan karna terlewat dengan mudah pihak kecamatan memasukan ke daftar penerima bantuan sosial.

1. Pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam upaya perbaikan ekonomi di kecamatan Sumobito jombang

Bantuan Sosial Tunai sudah berjalan dan rencana pemerintah memperpanjang bantuan sosial yang disalurkan. Untuk implementasi bantuan sosial sudah dilaksanakan pemerintah desa dengan baik sesuai kebijakan yang sudah diatur. Dan dilaksanakan sampai tingkat kecamatan, dan desa. Pendataan dan verifikasi dilakukan oleh staf kantor kecamatan. Sumberdana dari APBN dan APBD, Tersalurkan dengan baik.

2. Dampak program bantuan sosial tunai (BST) terhadap perekonomian di kecamatan Sumobito :

- a. Usaha kecil tetap mendapatkan penghasilan yang stabil karena masyarakat mendapat uang tambahan dari pemerintah.
- b. Dapat mencukupi kebutuhan sehari hari dengan dana bantuan dari pemerintah.
- c. mendapatkan uang tambahan untuk berbelanja lebih di kecamatan sumobito
- d. pedagang di kecamatan sumobito tidak lagi lesu, para penjual khususnya makanan sudah berangsur stabil
- e. Kebutuhan sehari-hari terpenuhi.
- f. Memiliki modal usaha yang bertambah bagi para penjual mikro seperti penjual gorengan.

Saran

Dalam melakukan pendataan bantuan sosial pemerintah kecamatan Sumobito harus lebih teliti dalam mendata penduduk yang tidak mampu atau yang berhak menerima agar tidak ada yang terlewat dan masyarakat harus melengkapi dan manaruh perhatian lebih untuk mengurus Kartu keluarga, atau KTP yang sudah habis masa berlakunya agar dapat mengajukan bantuan sosial Tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Suud, Mohammad. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Suharto, Edi. 2006. *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sasha Rahmasari. 2018. *Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses Di Kabupaten Wonogiri*. Journal

Agustinus sale. 2019. *Penyalahgunaan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah: Fakta Nyata Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan*. Journal